

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penanganan tindak pidana pencurian ringan yang sering kali masih diproses melalui prosedur peradilan pidana formal yang panjang dan berorientasi pada pemidanaan. Meskipun secara normatif Pasal 364 KUHP telah memberikan ruang diferensiasi bagi pencurian dengan nilai kerugian kecil, dalam praktiknya mekanisme ini belum mencerminkan rasa keadilan yang proporsional bagi korban maupun pelaku. Kondisi tersebut diperburuk oleh adanya fragmentasi kewenangan antarlembaga penegak hukum, di mana pengaturan Restorative Justice (RJ) masih bersifat sektoral dan terpisah-pisah antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Masalah utama yang dikaji adalah urgensi penyatuan kewenangan penerapan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan guna mengatasi ketidakpastian hukum dan inefisiensi sistem peradilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan penyatuan kewenangan mengakibatkan penerapan RJ sangat bergantung pada diskresi aparat masing-masing, sehingga memicu inkonsistensi perlakuan terhadap kasus serupa. Fragmentasi ini menghambat efektivitas pemulihan bagi korban dan penyelesaian cepat perkara ringan, yang seharusnya dapat diselesaikan secara non-litigasi sejak tahap awal penyidikan. Sebagai simpulan, diperlukan pembentukan pedoman nasional terpadu dan penyatuan kewenangan pada tingkat penyidikan untuk menjamin kepastian hukum dan mewujudkan keadilan substantif. Langkah strategis ini diharapkan dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi masyarakat.

Kata kunci : Keadilan Restoratif, Pencurian Ringan, Penyatuan Kewenangan, Penyidikan.

ABSTRACT

This research is motivated by the phenomenon of handling petty theft crimes, which are often still processed through lengthy formal criminal justice procedures that are oriented towards punishment. Although Article 364 of the Criminal Code normatively provides room for differentiation for theft with small losses, in practice this mechanism does not reflect a sense of proportional justice for both victims and perpetrators. This condition is exacerbated by the fragmentation of authority among law enforcement agencies, where the regulation of Restorative Justice (RJ) is still sectoral and separate between the Police, the Prosecutor's Office, and the Supreme Court. The main issue examined is the urgency of unifying the authority to implement restorative justice at the investigative level to overcome legal uncertainty and inefficiency in the justice system.

The research method used is normative legal research with a regulatory approach (statutory approach) and a contextual approach (conceptual approach). The legal materials used include primary legal materials in the form of statutory regulations, secondary legal materials in the form of legal literature and journals, and tertiary legal materials as supporting materials.

The study's findings indicate that the lack of unified authority results in the implementation of RJ relying heavily on the discretion of individual authorities, leading to inconsistent treatment of similar cases. This fragmentation hinders effective victim recovery and the rapid resolution of minor cases, which should be resolved non-litigationally from the initial stages of investigation. In conclusion, the establishment of unified national guidelines and the unification of authority at the investigative level are necessary to ensure legal certainty and achieve substantive justice. This strategic step is expected to reduce the caseload in court and provide more humane legal protection for the public.

Keywords: Restorative Justice, Petty Theft, Consolidation of Authority, Investigation.